

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan berbagai teori dan konsep yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Tujuan dari kajian pustaka ini adalah untuk membangun fondasi teoretis yang kokoh serta menempatkan penelitian dalam konteks keilmuan yang lebih luas. Dalam bab ini akan dibahas teori-teori mengenai pengorganisasian, kepemimpinan, pemimpin lokal (*local leader*), anak, partisipasi anak, perlindungan anak, pendekatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, serta konsep rekayasa teknologi yang relevan untuk mendukung proses analisis dalam penelitian. Kajian pustaka ini juga menjadi pijakan untuk memahami permasalahan yang diteliti dan mengidentifikasi ruang pengembangan yang dapat dijadikan fokus dalam penelitian ini.

2.1 Kajian tentang Pengorganisasian

2.1.1 Pengertian Pengorganisasian

Istilah pengorganisasian berasal dari kata *organizing* yang berarti menyusun atau menata. Dalam konteks manajemen, pengorganisasian merupakan salah satu fungsi utama yang bersifat dinamis dan terus berkembang (Aliefiani Mulya Putri et al., 2022). pengorganisasian merujuk pada proses pengaturan tugas serta distribusi pekerjaan di antara anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif (Alfina & Anwar, 2020). Hasibuan (2011) dalam (Aliefiani Mulya Putri et al., 2022) menjelaskan bahwa pengorganisasian adalah serangkaian proses yang mencakup penentuan, pengelompokan, dan

pengaturan kegiatan yang dibutuhkan untuk meraih tujuan tertentu. Proses ini juga mencakup penempatan individu yang sesuai pada setiap kegiatan, penyediaan sarana pendukung, serta pembagian wewenang yang sesuai bagi setiap orang yang terlibat (Aliefiani Mulya Putri et al., 2022). Dalam konteks penelitian ini, pengorganisasian yang dimaksud lebih difokuskan pada pengorganisasian dalam kerangka perlindungan anak rentan yang berbasis masyarakat.

Pengorganisasian dan pengorganisasian masyarakat memiliki peran penting dalam upaya perlindungan anak berbasis masyarakat, khususnya melalui peran strategis *local leader*. Pengorganisasian berfungsi sebagai landasan untuk mengatur dan mengelola sumber daya, peran, serta tanggung jawab berbagai pihak secara terstruktur guna mencapai tujuan perlindungan anak. Konsep ini kemudian berkembang dalam pengorganisasian masyarakat, yang menekankan pada partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat, termasuk keluarga, komunitas, dan lembaga lokal untuk membangun kesadaran, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif dalam melindungi anak-anak yang rentan.

Pengorganisasian masyarakat dimaknai sebagai suatu kerangka menyeluruh dalam rangka memecahkan masalah ketidakadilan dan membangun tatanan yang lebih adil di masyarakat (Siregar Putra et. al. 2021). Definisi lain dari pengorganisasian masyarakat yaitu pencarian kekuatan sosial dan usaha untuk melawan ketidakberdayaan melalui belajar secara personal maupun secara politik untuk meningkatkan kapasitas berdemokrasi dan menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan agar masyarakat lebih mampu beradaptasi dan pemerintahan dapat lebih bertanggungjawab (Ismail, 2022). Dari pemaparan definisi tersebut

dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian masyarakat merupakan proses dimana masyarakat secara kolektif mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan tujuan berdasarkan skala prioritas dengan memanfaatkan sistem sumber yang ada.

2.1.2 Tujuan Pengorganisasian

Tujuan merupakan komponen fundamental dalam keberlangsungan sebuah organisasi. Setiap organisasi perlu memiliki arah dan sasaran yang jelas agar aktivitas yang dijalankan tidak menyimpang dari maksud utama pembentukannya. Tanpa tujuan yang jelas, organisasi akan kehilangan arah dalam menjalankan kegiatannya. Tujuan tersebut berfungsi sebagai pedoman serta sasaran yang ingin dicapai, sehingga menjadi alasan utama dalam pelaksanaan berbagai aktivitas organisasi. Tujuan organisasi berperan dalam membimbing individu-individu agar dapat bekerja sama secara efektif.

Tujuan organisasi menurut George R.Terry ialah untuk membimbing manusia-manusia bekerja sama secara efektif. Pendapat lainnya terkait tujuan pengorganisasian menurut (Karta Sapoetra, 1982) dalam (Nawawi et al., 2024) yaitu:

1. Pengorganisasian yang efektif akan membuat setiap anggota organisasi memahami kegiatan yang harus dilaksanakan.
2. Pengorganisasian yang tepat, hubungan kerja dalam organisasi akan menjadi lebih jelas dan tegas.
3. Hubungan yang terstruktur dengan baik antara berbagai aktivitas dan pelaksanaannya akan tercapai, sehingga organisasi ini akan memberikan

manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan usaha individu yang terpisah-pisah.

4. Pengorganisasian yang baik juga berarti pendelegasian wewenang yang jelas, sehingga anggota yang menerima wewenang tersebut dapat bertanggung jawab dengan tepat.
5. Pengorganisasian yang efektif melibatkan pemanfaatan sumber daya manusia secara maksimal dan menciptakan hubungan yang sesuai antara pekerjaan, individu, pelaksanaan, dan fasilitas, yang kemudian dievaluasi dan diseimbangkan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja.

2.1.3 Fungsi Pengorganisasian

Fungsi utama pengorganisasian mencakup pembentukan struktur organisasi, mendefinisikan peran dan tanggung jawab, serta memfasilitasi koordinasi diantara berbagai unit organisasi (Wardhana, 2024). Adapun penjelasan lebih lanjut dari ketiga fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan struktur organisasi

Fungsi pengorganisasian dalam manajemen berperan penting dalam membentuk struktur organisasi yang tepat dan memastikan koordinasi yang efektif di antara berbagai unit organisasi. Manajer harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti lingkungan eksternal, tujuan organisasi, dan budaya organisasi saat menentukan struktur organisasi yang tepat. Pembentukan struktur organisasi dalam pengorganisasian adalah proses penting untuk menciptakan kerangka kerja yang efektif bagi suatu organisasi. Struktur organisasi menggambarkan garis hierarki dan hubungan diantara berbagai

fungsi, bagian, dan individu dalam organisasi. Berikut adalah langkah-langkah dan elemen kunci dalam pembentukan struktur organisasi.

- 1) Menetapkan Tujuan Organisasi. Struktur organisasi harus disusun agar dapat mendukung pencapaian tujuan secara optimal.
- 2) Mengidentifikasi Sumber Daya. Mengevaluasi sumber daya yang tersedia, termasuk tenaga kerja, keuangan, dan teknologi, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Pembagian Tugas dan Fungsi. Menentukan tugas utama dan mengelompokkannya ke dalam fungsi atau divisi tertentu guna meningkatkan spesialisasi serta efisiensi operasional.
- 4) Departementalisasi. Mengorganisir tugas-tugas yang serupa ke dalam unit atau departemen, seperti pemasaran, produksi, atau keuangan, agar lebih terstruktur.
- 5) Delegasi Wewenang. Menetapkan tanggung jawab serta memberikan wewenang kepada individu atau unit tertentu untuk memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara efektif pada setiap tingkat organisasi.
- 6) Koordinasi Antar Bagian. Mengembangkan mekanisme koordinasi yang memastikan seluruh bagian organisasi bekerja selaras, menghindari tumpang tindih peran, serta memastikan kelancaran operasional.
- 7) Pemilihan Jenis Struktur Organisasi. Menentukan jenis struktur organisasi yang paling sesuai dengan kebutuhan, seperti struktur fungsional, matriks, atau garis dan staf.

2. Menetapkan peran dan tanggung jawab

Menentukan peran dan tanggung jawab dalam proses pengorganisasian merupakan langkah krusial untuk memastikan operasi organisasi berjalan secara efisien dan efektif. Berikut beberapa langkah serta manfaat utama dalam proses ini:

- 1) Identifikasi Kebutuhan Organisasi. Menentukan keterampilan, keahlian, dan fungsi yang diperlukan guna mencapai tujuan organisasi atau proyek.
- 2) Distribusi Peran yang Jelas. Setiap anggota tim harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab mereka. Pembagian peran yang terstruktur membantu anggota tim mengetahui ekspektasi serta cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 3) Dokumentasi dan Komunikasi yang Efektif. Menyusun deskripsi peran secara rinci serta memastikan informasi ini tersampaikan dengan baik kepada seluruh anggota tim. Dokumentasi yang baik dapat menjaga konsistensi dan mencegah kebingungan.
- 4) Evaluasi dan Penyesuaian Secara Berkala. Definisi peran harus bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan organisasi. Evaluasi rutin perlu dilakukan untuk menyesuaikan tugas dan tanggung jawab dengan kebutuhan yang terus berubah.
- 5) Peningkatan Produktivitas. Kejelasan dalam peran dan tanggung jawab mendorong peningkatan produktivitas dengan memastikan setiap upaya anggota tim difokuskan pada tujuan yang sama.

- 6) Peningkatan Koordinasi. Dengan peran yang terdefinisi dengan baik, koordinasi antar tim atau departemen menjadi lebih efektif karena setiap individu memahami siapa yang bertanggung jawab atas tugas tertentu.

3. Memfasilitasi koordinasi antarunit organisasi

Mengoptimalkan koordinasi antar berbagai unit dalam suatu organisasi merupakan aspek krusial dalam memastikan setiap bagian dapat bekerja secara selaras dan efisien. Dengan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat meningkatkan efektivitas koordinasi antar unit kerja, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan. Berikut beberapa langkah dan metode yang dapat digunakan untuk memperlancar koordinasi:

- 1) Pembentukan tim koordinasi. Membentuk tim yang terdiri dari perwakilan setiap unit terkait guna memperkuat komunikasi dan kolaborasi.
- 2) Penyelarasan tujuan. Menyatukan visi organisasi dengan tujuan masing-masing unit kerja agar seluruh bagian bergerak menuju arah yang sama.
- 3) Penunjukan penghubung antarunit. Menugaskan individu tertentu sebagai penghubung untuk memastikan kelancaran komunikasi antar unit yang berbeda.
- 4) Perencanaan terpadu. Menggabungkan rencana dari berbagai unit melalui diskusi dan pertukaran informasi agar tercapai keselarasan.

- 5) Komunikasi yang efektif. Membangun komunikasi yang terbuka dan transparan di seluruh unit kerja untuk mengurangi risiko miskomunikasi dan meningkatkan efektivitas organisasi.

2.1.4 Prinsip Pengorganisasian

untuk menciptakan struktur organisasi yang efektif dan efisien, sehingga pelaksanaan kegiatan organisasi dapat berjalan optimal. Hasibuan mengemukakan bahwa terdapat sejumlah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam proses pengorganisasian, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip tujuan organisasi (*Principle of Organizational*)

Prinsip ini menekankan bahwa tujuan organisasi harus ditetapkan secara jelas dan rasional, baik untuk memperoleh keuntungan maupun memberikan pelayanan. Prinsip ini menjadi aspek fundamental dalam penyusunan struktur organisasi.

2. Prinsip kesatuan arah (*Principle of Unity of Objective*)

Setiap organisasi atau perusahaan harus memiliki tujuan yang selaras dan terarah untuk memastikan pencapaian hasil yang optimal.

3. Prinsip kesatuan perintah (*Principle of Unity of Command*)

Berdasarkan prinsip ini, setiap bawahan sebaiknya hanya menerima perintah dan memberikan pertanggungjawaban kepada satu atasan. Namun, seorang atasan dapat memberikan instruksi kepada beberapa bawahan sekaligus.

4. Prinsip rentang kendali (*Principle of the Span of Management*)

Prinsip ini menyatakan bahwa seorang manajer hanya dapat mengawasi sejumlah bawahan dalam jumlah tertentu secara efektif, biasanya berkisar

antara 3 hingga 9 orang. Jumlah ini bergantung pada kompetensi serta kapasitas manajer dalam mengelola tim.

5. Prinsip pendelegasian wewenang (*Principle of Delegation of Authority*)

Dalam prinsip ini, pendelegasian wewenang harus dilakukan dengan jelas dan efektif, sehingga individu yang menerima wewenang memahami batasan dan tanggung jawabnya dengan baik.

6. Prinsip keseimbangan wewenang dan tanggung Jawab (*Principle of Parity of Authority and Responsibility*)

Prinsip ini menekankan bahwa antara wewenang yang diberikan dan tanggung jawab yang diemban harus dalam keadaan seimbang, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau ketidakseimbangan dalam pelaksanaan tugas.

7. Prinsip tanggung jawab (*Principle of Responsibility*)

Berdasarkan prinsip ini seorang bawahan harus mempertanggungjawabkan tugasnya sesuai dengan garis wewenang yang telah diberikan. Tanggungjawab hanya diberikan kepada pihak yang telah mendelegasikan wewenang tersebut.

8. Prinsip pembagian kerja (*Principle of Departementation / Division of Work*)

Prinsip ini menyarankan bahwa tugas, pekerjaan, atau aktivitas yang memiliki keterkaitan erat sebaiknya dikelompokkan dalam satu unit kerja atau departemen tertentu agar pelaksanaan kerja lebih terorganisir dan efisien.

9. Prinsip penempatan personalia (*Principle of Personnel Placement*)

Prinsip ini menegaskan bahwa individu harus ditempatkan dalam suatu jabatan berdasarkan kecakapan, keahlian, dan keterampilannya agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif.

10. Prinsip jenjang berangkai (*Principle of Scalar Chain*)

Dalam prinsip ini, alur perintah dan wewenang dari atasan ke bawahan harus mengikuti jalur hierarki yang jelas dan tidak terputus, dengan jalur komunikasi yang seefisien mungkin. Pertanggungjawaban dari bawahan ke atasan harus mengikuti rantai hierarki yang sama secara langsung dan efektif.

11. Prinsip efisiensi (*Principle of Efficiency*)

Organisasi harus berupaya mencapai hasil yang maksimal dengan pengorbanan atau penggunaan sumber daya seminimal mungkin, sehingga operasionalnya lebih efektif dan efisien.

12. Prinsip kesinambungan (*Principle of Continuity*)

Agar organisasi dapat bertahan dalam jangka panjang, perlu diterapkan strategi yang menjamin kelangsungan serta stabilitas operasionalnya.

13. Prinsip koordinasi (*Principle of Coordination*)

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari prinsip-prinsip organisasi lainnya, di mana koordinasi bertujuan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan berbagai tindakan dalam organisasi agar semua aktivitas berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.5 Kriteria Pengorganisasian yang Efektif

Pengorganisasian yang efektif akan mendorong terciptanya efektivitas organisasi, yang dapat dinilai melalui beberapa indikator seperti tingkat

produktivitas, kemampuan beradaptasi, dan kepuasan kerja anggota (Wardhana, 2024). Penjelasan dari masing-masing kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Produktivitas

Produktivitas merujuk pada kemampuan individu, sistem, atau organisasi dalam menghasilkan barang atau jasa dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien dan efektif. Ukuran produktivitas dihitung dengan membandingkan hasil (output) dengan input yang digunakan.

2. Adaptabilitas

Adaptabilitas adalah kemampuan individu atau organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan situasi atau lingkungan secara cepat dan efektif. Ini mencakup berbagai aspek, seperti kemampuan untuk merespons perubahan teknologi, kebijakan, atau preferensi pelanggan dengan fleksibilitas dan kreativitas. Adaptabilitas juga melibatkan sikap terbuka terhadap ide baru, kemauan untuk terus belajar, serta kemampuan untuk menyesuaikan strategi atau pendekatan sesuai dengan kebutuhan yang berubah. Pengorganisasian yang efektif mendukung adaptabilitas dengan mengembangkan struktur yang fleksibel dan proses manajerial yang responsif terhadap perubahan.

3. Kepuasan kerja anggota

Kepuasan kerja anggota merujuk pada tingkat kepuasan emosional dan psikologis yang dirasakan oleh anggota terhadap pekerjaannya di organisasi. Hal ini mencakup perasaan senang, bahagia, dan terpenuhi yang dirasakan anggota terhadap berbagai aspek pekerjaan mereka, seperti lingkungan kerja, gaji, tunjangan, peluang pengembangan karier, serta interaksi dengan rekan

kerja dan atasan. Kepuasan kerja juga berkaitan dengan sejauh mana pekerjaan tersebut sesuai dengan ekspektasi anggota, baik dari sisi tanggung jawab maupun kesempatan untuk memberikan kontribusi yang berarti.

2.1.6 Mekanisme Pengorganisasian

Menurut Ernest Dale dalam (Nawawi et al., 2024) menyebutkan bahwa langkah-langkah dalam pengorganisasian adalah sebagai berikut:

1. Perincian tugas

Langkah awal dalam pengorganisasian adalah mengidentifikasi dan menguraikan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Pembagian kerja

Langkah kedua melibatkan pembagian beban kerja ke dalam aktivitas-aktivitas yang dapat dijalankan oleh individu maupun kelompok. Dalam tahap ini, penting untuk memastikan bahwa tugas diberikan kepada individu yang memiliki kualifikasi yang sesuai serta dengan beban kerja yang seimbang, tidak terlalu berat maupun terlalu ringan.

3. Penyatuan pekerjaan

Langkah ketiga adalah menyusun tugas-tugas anggota organisasi secara logis dan efisien. Jika organisasi berkembang dan menjadi lebih kompleks, maka tugas-tugas yang berkaitan perlu dikelompokkan dalam unit kerja tertentu, yang dikenal sebagai departementalisasi.

4. Koordinasi pekerjaan

Langkah keempat adalah menetapkan mekanisme koordinasi untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan berjalan selaras dalam suatu sistem yang harmonis. Dalam proses kerja, potensi konflik antar anggota dapat muncul, sehingga mekanisme koordinasi berperan dalam menjaga efektivitas kerja tim.

5. Monitoring dan reorganisasi

Langkah kelima mencakup pemantauan dan penyesuaian untuk mempertahankan serta meningkatkan efektivitas organisasi. Karena pengorganisasian merupakan proses yang terus berlangsung, evaluasi terhadap keempat langkah sebelumnya perlu dilakukan secara sistematis dan berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses tetap konsisten, efektif, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan organisasi.

Kajian mengenai pengorganisasian dan pengorganisasian masyarakat memiliki titik temu yang penting dalam upaya merancang intervensi sosial yang efektif dan berkelanjutan. Pengorganisasian, dalam perspektif manajerial, menekankan pada struktur, perencanaan, dan koordinasi sumber daya secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu, pengorganisasian masyarakat lebih menitikberatkan pada proses pemberdayaan, partisipasi, dan kemandirian warga dalam menghadapi persoalan yang mereka alami secara langsung. Keduanya dapat saling melengkapi ketika diterapkan dalam konteks perlindungan anak berbasis masyarakat.

2.1.7 Pengertian Pengorganisasian Masyarakat

Pengorganisasian masyarakat dapat diartikan sebagai suatu pendekatan menyeluruh yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan membangun struktur masyarakat yang lebih adil (Siregar Putra et. al. 2021). Definisi lain dari pengorganisasian masyarakat yaitu proses pencarian dan pembentukan kekuatan sosial yang bertujuan untuk mengatasi ketidakberdayaan melalui proses pembelajaran secara individu maupun kolektif. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas demokrasi dan mewujudkan transformasi sosial yang berkelanjutan, sehingga masyarakat mampu beradaptasi dan pemerintah dapat menjalankan tanggung jawabnya secara lebih baik (Ismail, 2022). Dari pemaparan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian masyarakat merupakan proses dimana masyarakat secara kolektif mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan tujuan berdasarkan skala prioritas dengan memanfaatkan sistem sumber yang ada.

2.1.8 Tujuan Pengorganisasian Masyarakat

Pengorganisasian masyarakat memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mendorong terciptanya kekuatan yang efektif dari dalam masyarakat agar mereka dapat secara mandiri menentukan arah pembangunan dan masa depan yang diinginkan. Kedua, membentuk serta menjaga keberlangsungan struktur organisasi yang stabil dan berfungsi untuk memberikan layanan sesuai kebutuhan masyarakat. Ketiga, menstimulasi masyarakat agar membentuk atau berpartisipasi dalam organisasi yang memberikan manfaat kolektif (Apuan, 1988) dalam (Gutama et al., 2022).

2.1.9 Elemen Pengorganisasian Masyarakat

Menurut (Pyles, 2007) dalam (Gutama et al., 2022) elemen-elemen dalam pengorganisasian masyarakat antara lain:

1. Proses yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh unsur masyarakat, termasuk masyarakat rentan.
2. Penguatan kapasitas masyarakat lokal.
3. Menghubungkan masalah pembangunan.
4. Pihak luar yang mendukung, memfasilitasi, dan berperan dalam memberikan ide untuk memicu munculnya inisiatif masyarakat.

Pengorganisasian masyarakat dan perlindungan anak memiliki keterkaitan yang erat dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak. Melalui pengorganisasian masyarakat, individu dan kelompok dalam komunitas dapat diberdayakan untuk mengenali permasalahan yang dihadapi anak-anak, mengidentifikasi kebutuhan mereka, serta merancang solusi yang efektif dan berkelanjutan. Struktur organisasi yang terbentuk memungkinkan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk keluarga, lembaga sosial, dan pemerintah, dalam mengadvokasi serta mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak. Dengan demikian, pengorganisasian masyarakat menjadi strategi penting dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi serta menciptakan sistem perlindungan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka.

Pengorganisasian dan kepemimpinan merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam membangun tata kelola yang efektif. Pengorganisasian merujuk pada proses penataan sumber daya, peran, dan struktur untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan kepemimpinan berperan dalam memberikan arah, mempengaruhi, dan menggerakkan individu atau kelompok dalam kerangka organisasi tersebut. Dalam konteks perlindungan anak berbasis masyarakat, pengorganisasian menjadi wadah yang memungkinkan terbentuknya sistem kerja yang kolaboratif dan partisipatif, sementara kepemimpinan menjadi kekuatan penggerak yang memastikan setiap elemen organisasi berfungsi secara sinergis. Keberhasilan pengorganisasian sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, begitu pula sebaliknya, efektivitas kepemimpinan akan terwujud apabila didukung oleh struktur dan mekanisme organisasi yang kuat.

2.2 Kajian tentang Kepemimpinan

2.2.1 Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan dipahami sebagai sebuah proses yang dinamis dalam memengaruhi individu maupun kelompok, tidak hanya melalui pemikiran rasional, tetapi juga melalui pengaruh emosional dan perilaku. Pemimpin memainkan peran penting dalam menggerakkan potensi individu maupun kelompok, dengan cara mengarahkan seluruh sumber daya, baik manusia, material, maupun kelembagaan, untuk mencapai tujuan bersama yang telah dirumuskan (Simarmata et al., 2021) dalam (Iriana et al., 2023). Kepemimpinan dalam konsep kemasyarakatan mencerminkan kemampuan untuk membangun kesepahaman, menumbuhkan partisipasi, serta menciptakan komitmen kolektif

demi mewujudkan perubahan yang diharapkan bersama. Kepemimpinan berperan sebagai penggerak dan pengarah utama dalam mengelola berbagai sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi, baik itu sumber daya manusia, sumber daya alam, pendanaan, maupun sarana pendukung lainnya (Kartono, 2019) dalam (Iriana et al., 2023).

Pemimpin dalam organisasi berperan sebagai penghubung antara anggota dan struktur organisasi itu sendiri, sehingga memungkinkan setiap anggota menjalankan perannya secara optimal. Pemimpin juga berfungsi sebagai fasilitator yang menjembatani antara aspirasi dan harapan anggota dengan kapasitas organisasi dalam mengakomodasi dan mewujudkan tujuan bersama secara realistis (Maulana et al., 2021) dalam (Masruhin & Raudhoh, 2022).

2.2.2 Fungsi Kepemimpinan

Menurut (Irmawati, 2022) dalam (Bawor et al., 2023), terdapat lima fungsi utama dalam kepemimpinan. Pertama, fungsi instruktif, di mana pemimpin berperan sebagai pihak yang menetapkan keputusan dan memberikan arahan untuk dilaksanakan. Kedua, fungsi konsultatif, yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemimpin dan anggota guna menggali informasi serta masukan secara menyeluruh. Ketiga, fungsi partisipatif, yaitu keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan agar tercipta rasa memiliki terhadap keputusan yang diambil. Keempat, fungsi delegatif, yang mengacu pada kemampuan pemimpin dalam mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab, baik dengan persetujuan maupun secara langsung. Kelima, fungsi pengendalian,

yang menuntut pemimpin untuk mengelola dan mengawasi seluruh aktivitas organisasi agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2.3 Tipe Kepemimpinan

Cara seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya memiliki dampak besar terhadap dinamika organisasi dan tingkat partisipasi warga. Setiap tipe kepemimpinan menggambarkan pendekatan pemimpin dalam mengambil keputusan, menjalin hubungan dengan anggota, serta mengelola potensi yang ada dan menyikapi konflik. Dalam konteks pengorganisasian perlindungan anak berbasis masyarakat, penting untuk mengkaji jenis kepemimpinan yang paling relevan dan efektif. Berikut ini adalah uraian mengenai beberapa tipe kepemimpinan yang dapat diterapkan.

1. Kepemimpinan partisipatif merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang dijalankan oleh individu yang memiliki kepercayaan dan kredibilitas, yang kemudian digunakan untuk memotivasi orang lain dengan cara melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan ini memberikan ruang dan peran yang besar bagi anggota organisasi untuk turut serta secara aktif dalam berbagai proses pengambilan keputusan yang menyangkut aktivitas bersama (Masruhin & Raudhoh, 2022).
2. Kepemimpinan transformasional menurut (Tavfelin, 2013) dalam (Masruhin & Raudhoh, 2022) mengatakan bahwa salah satu pendekatan kepemimpinan yang dianggap efektif dalam menghadapi perubahan dalam organisasi pelayanan sosial adalah kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini merupakan bagian dari paradigma kepemimpinan modern

yang menekankan pentingnya pengaruh karismatik dan keterlibatan emosional pemimpin dalam menginspirasi dan memotivasi anggota organisasi.

Setelah membahas konsep kepemimpinan secara umum, penting untuk melihat peran pemimpin lokal dalam masyarakat desa. Pemimpin lokal seperti kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kader sosial adalah contoh nyata dari kepemimpinan di tingkat komunitas. Mereka tidak hanya mengurus hal-hal administratif, tetapi juga berperan sebagai penggerak sosial yang mengenal budaya, nilai-nilai lokal, dan kehidupan masyarakat sehari-hari.

2.3 Kajian tentang *Local Leader*

2.3.1 Pengertian *Local Leader*

Tokoh masyarakat yang memiliki peran dalam mengembangkan masyarakat agar memiliki keberfungsian sosial yang baik, disebut sebagai pemimpin informal. Pemimpin informal dapat juga disebut sebagai pemimpin lokal yang dapat menggerakkan masyarakatnya dalam segala hal yang dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kehidupan (Ramadhan et al., 2019). *Local leader* merupakan pionir dan inovator bagi komunitas lokal (Kushadajani & Permana, 2020). *Local leader* yaitu anggota masyarakat yang tinggal di dalam masyarakat dan memiliki kepedulian untuk membantu masyarakat setempat dan memiliki dampak yang signifikan terhadap hal itu (Saha, 2020). *Local leader* sangat menentukan keberhasilan dalam pengembangan komunitas sehingga secara efektif dapat menjadi agen perubahan sosial di daerah

pedesaan. Salah satu fungsi *local leader* yaitu sebagai inisiator agar terjadinya pengembangan komunitas yang efektif.

2.3.2 Karakteristik *Local Leader*

Pemerintah, masyarakat, perusahaan, dan berbagai kelompok serta organisasi sangat bergantung pada kepemimpinan yang baik untuk memengaruhi kondisi kehidupan masyarakat yang mereka layani. Langkah pertama untuk menjadi pemimpin yang sukses adalah memiliki ide yang fantastis dan menyusun tim untuk mewujudkannya (Bass & Bass, 2008) dalam (Chukwuemeka et al., 2021).

Karakteristik kepemimpinan menurut (Charry, 2012) dalam (Chukwuemeka et al., 2021) adalah sebagai berikut:

1. **Fleksibilitas:** untuk bertahan hidup dan mengembangkan cara baru untuk mencapai sasaran, seorang pemimpin yang sukses harus mampu mengubah penyebab agar sesuai dengan skenario saat ini.
2. **Komunikasi:** Seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan bawahannya dengan mengungkapkan pendapat mereka dan memberdayakan mereka dengan menguraikan tujuan kelompok dan menunjukkan cara mencapainya.
3. **Keberanian, keuletan, dan kesabaran:** seorang pemimpin yang baik harus memiliki keberanian untuk bertahan, keuletan untuk melawan tekanan dan intimidasi, dan kesabaran untuk bertahan sampai tujuannya tercapai.
4. **Kerendahan hati dan kehadiran:** seorang pemimpin yang baik harus mampu berkomunikasi dengan dan mendengarkan masyarakat, serta menunjukkan

rasa hormat kepada mereka dengan bersikap jujur, tegas tetapi adil, dan memiliki integritas.

5. Akuntabilitas: Seorang pemimpin harus selalu bertanggung jawab dan bersedia menerima tanggung jawab.

2.3.3 Fungsi *Local Leader*

Seorang pemimpin harus mampu menetapkan tujuan kelompok, membuat rencana, memotivasi dan menginspirasi bawahan, mengawasi kinerja, dan melakukan berbagai tugas lainnya. Berikut ini adalah fungsi kepemimpinan yang penting, menurut Lamb (2013) dalam (Chukwuemeka et al., 2021):

1. Pengembangan kerja tim: Seorang pemimpin yang baik membantu tim mereka tumbuh sebagai satu kesatuan. Tugas seorang pemimpin adalah membangun lingkungan yang ramah dengan mengamati kompetensi, kebutuhan, dan keterampilan masa depan komunitas mereka.
2. Berfungsi sebagai representasi rakyat: Seorang pemimpin yang baik berfungsi sebagai juru bicara komunitas mereka. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah dengan mengomunikasikan masalah dan keluhan masyarakat kepada pemerintah saat dibutuhkan.
3. Berfungsi sebagai penasihat bagi masyarakat: Seorang pemimpin yang baik berfungsi sebagai penasihat bagi orang-orang di komunitas mereka. Seorang pemimpin memimpin dan menasihati rakyatnya tentang kebutuhan mereka dan cara terbaik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
4. Bertindak sebagai manajer waktu: Salah satu tanggung jawab terpenting seorang pemimpin adalah mengatur waktu. Hal ini untuk memastikan

penyelesaian proyek pembangunan tepat waktu pada berbagai tahap pembangunan. Manajemen waktu juga membantu memastikan kualitas dan efisiensi upaya pembangunan.

5. Penggunaan wewenang yang tepat: Seorang pemimpin yang baik harus cukup pintar dan jeli untuk mengetahui kapan dan bagaimana memanfaatkan kekuasaan mereka dalam hubungannya dengan bawahan, tergantung pada keadaan. Mereka mungkin memanfaatkan penghargaan, paksaan, wewenang, serta kekuasaan resmi dan informal, untuk mendorong bawahan mereka agar bersikap bahagia.

Fungsi *local leader* menurut (Martiskainen, 2017) yaitu menyuarakan harapan tentang tujuan dan visi proyek, pembelajar, membangun jejaring. Menurut (Ramadhan et al., 2019) yaitu mengambil keputusan, menghubungkan dengan pemerintah dan non-pemerintah, mengumpulkan sumbangan dan membiayai proyek, serta melakukan monitoring dan evaluasi proyek.

Pengorganisasian dalam perlindungan anak rentan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pekerja sosial dan masyarakat. Sebagai bagian dari upaya sistematis, pengorganisasian memastikan bahwa setiap elemen yang terlibat, baik individu maupun lembaga, memiliki peran yang jelas dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi anak-anak yang rentan terhadap kekerasan atau eksploitasi. Pekerja sosial berperan sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan anak dengan sumber daya yang tersedia di masyarakat, sementara masyarakat sendiri menjadi ekosistem yang mendukung tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang aman dan inklusif. Dengan koordinasi

yang baik, seluruh elemen ini dapat bersinergi untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang berkelanjutan dan berbasis pada kekuatan lokal.

2.4 Kajian tentang Perlindungan Anak

2.4.1 Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah isu yang kompleks dan multidimensional, yang didefinisikan oleh berbagai ahli dengan pendekatan yang berbeda. Perlindungan anak mencakup upaya pencegahan tindakan kekerasan terhadap anak melalui media edukasi yang dapat digunakan oleh orang tua, guru, dan anak itu sendiri untuk mengurangi perilaku kekerasan (Risma et al., 2019). Perlindungan ini tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup pendidikan, dukungan psikologis, dan keterlibatan komunitas dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak (Thalib, 2020). Berdasarkan pandangan tersebut, perlindungan anak dapat dipahami sebagai upaya yang melibatkan berbagai sektor yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, terhindar dari kekerasan, dan mendapatkan hak-haknya.

Michael G. Wessells adalah salah satu tokoh penting dalam bidang perlindungan anak di tingkat global, mengembangkan pendekatan yang menekankan pentingnya perlindungan anak berbasis masyarakat (*community-based child protection*). Dalam pandangannya, perlindungan anak adalah upaya kolektif untuk mencegah dan merespons segala bentuk kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran terhadap anak, yang dilakukan tidak hanya oleh negara atau lembaga formal, tetapi juga oleh masyarakat itu sendiri (Wessells, 2015).

Menurut Michael G. Wessells, sistem perlindungan anak yang efektif tidak cukup hanya bergantung pada struktur formal yang bersifat *top-down*, seperti layanan sosial atau sistem peradilan anak. Sebaliknya, ia menekankan pentingnya membangun mekanisme perlindungan nonformal yang berakar pada praktik, nilai, dan struktur sosial lokal. Masyarakat dianggap memiliki peran strategis karena lebih dekat dengan anak, memahami konteks sosial-budaya setempat, serta memiliki kapasitas untuk mendeteksi dan merespons kasus secara cepat dan berkelanjutan (Wessells, 2015).

Michael G. Wessells juga mengkritik pendekatan yang terlalu bergantung pada intervensi eksternal dan ahli dari luar komunitas. Menurutnya, pendekatan semacam itu sering kali menghasilkan tingkat kepemilikan yang rendah dari masyarakat, kurang efektif dalam pencegahan, dan tidak berkelanjutan. Sebagai alternatif, ia menawarkan pendekatan partisipatif dan dari bawah ke atas (*bottom-up*), di mana masyarakat termasuk anak-anak dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan, perumusan kebijakan lokal, serta dalam pengorganisasian mekanisme perlindungan anak yang sesuai dengan konteks mereka (Wessells, 2015).

Melalui pendekatan ini, perlindungan anak tidak hanya dipandang sebagai intervensi teknis, tetapi sebagai bagian dari proses perubahan sosial yang melibatkan dialog, pemberdayaan, dan transformasi relasi kuasa di tingkat komunitas. Pendekatan Michael G. Wessells sangat relevan dalam pengembangan desain pengorganisasian perlindungan anak berbasis masyarakat, terutama di tingkat desa yang memiliki kekuatan sosial dan nilai lokal yang khas.

2.4.2 Prinsip Perlindungan Anak

Agar tujuan perlindungan anak dapat direalisasikan maka segala aktivitas dan kegiatan pengasuhan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar anak. Prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar bagian setiap negara sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA) dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:

1. Prinsip Nondiskriminasi

Setiap anak mempunyai hak yang asama dengan anak yang lain secara fungsional dan proposional. Orang tua, keluarga, wali atau pengasuh harus memperlakukan anak satu dengan anak yang lain dengan sikap perlakuan yang sama.

2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap penyelenggara perlindungan anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan mereka. Keputusan tersebut tidak boleh didasarkan pada sudut pandang atau kepentingan orang dewasa semata.

3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Prinsip ini menekankan hak setiap anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan berkembang secara optimal. Hak ini mencakup jaminan atas keselamatan, kesejahteraan, serta kesempatan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial sesuai dengan potensi mereka.

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak menekankan pentingnya mendengarkan dan mempertimbangkan pandangan anak dalam setiap keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Anak berhak untuk diakui sebagai individu yang memiliki suara dan kapasitas untuk menyampaikan pikiran serta perasaan mereka, sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya. Dalam konteks perlindungan anak, prinsip ini mendorong orang dewasa, baik orang tua, pengasuh, maupun pihak yang bertanggung jawab, untuk memberikan ruang bagi anak untuk mengungkapkan pendapat mereka secara bebas tanpa rasa takut akan konsekuensi. Dengan cara ini, anak tidak hanya dihormati sebagai subjek yang terlindungi, tetapi juga sebagai individu yang aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hidup mereka.

2.4.3 Peran Masyarakat dalam Perlindungan Anak

Menurut (Tengker et al., 2021) bahwa masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha. Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan cara:

1. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;

2. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
3. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
4. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
5. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
6. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
7. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban;
8. Memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Setelah membahas konsep perlindungan anak yang menekankan pentingnya pemenuhan hak, pencegahan kekerasan, dan penciptaan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak, penting untuk memahami siapa subjek utama dari upaya tersebut, yaitu anak itu sendiri. Pemahaman yang utuh mengenai definisi anak, karakteristik perkembangan, kebutuhan, serta hak-haknya akan memperkuat dasar konseptual dalam merancang intervensi perlindungan yang tepat sasaran dan responsif terhadap kondisi riil anak di masyarakat. Kajian tentang Anak

2.6.1 Definisi Anak

Anak merupakan salah satu fase penting dalam kehidupan manusia. Memahami definisi anak menjadi hal yang penting dalam memastikan

kesejahteraan dan perlindungan anak. Definisi anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Tentang Perlindungan Anak dalam Izzatul Fitriyah (2023) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pendapat lain tentang definisi anak adalah anak merupakan keturunan atau generasi yang lahir sebagai hasil dari hubungan biologis antara seorang laki-laki dan perempuan, baik dalam ikatan pernikahan maupun di luar pernikahan (Alkayyis et al., 2021). Dari berbagai definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah individu yang masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik, mental, maupun emosional baik sejak kandungan sampai berumur sebelum 18 tahun.

2.6.2 Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memastikan tumbuh kembangnya yang optimal. Berikut adalah hak anak (Nazmi & Syofyan, 2023):

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya;
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus;
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya;
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang;
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi baik

ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.
12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2.6.3 Kebutuhan Anak

Teori kebutuhan dasar yang dikembangkan oleh Maslow dikenal dengan konsep hierarki kebutuhan (*hierarchy of needs*). Dalam teori ini terdapat lima tingkatan kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan keamanan dan perlindungan, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa memiliki, kebutuhan akan penghargaan atau harga diri, serta kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Hierarki ini menunjukkan bahwa seseorang harus memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah sebelum dapat mencapai tingkat kebutuhan yang lebih tinggi (Annisa Nidaur Rohmah, 2020).

Berikut tingkatan kebutuhan menurut Maslow dalam (Muazaroh & Subaidi, 2019) dan (Annisa Nidaur Rohmah, 2020):

1. Kebutuhan fisik

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling dasar dan harus dipenuhi terlebih dahulu karena berhubungan langsung dengan

keberlangsungan hidup serta kondisi fisik anak. Kebutuhan fisik antara lain makan, minum, waktu untuk istirahat, buang air besar dan kecil, dan seksual.

2. Kebutuhan rasa aman

Kebutuhan rasa aman akan muncul setelah kebutuhan fisik terpenuhi. Kebutuhan rasa aman meliputi rasa aman, bebas dari rasa takut, kekacauan, stabilitas, dan ketergantungan. Kebutuhan rasa aman bertujuan untuk mengembangkan hidup manusia supaya menjadi lebih baik. Anak akan merasa aman apabila berada dalam keluarga yang kuat dan harmonis. Sebaliknya, jika ikatan keluarga lemah, anak dapat mengalami kecemasan, kegelisahan, ketidaktenangan, stres, serta kurangnya rasa percaya diri.

3. Kebutuhan akan kepemilikan dan dicintai

Setelah kebutuhan fisik dan kebutuhan rasa aman terpenuhi manusia cenderung membutuhkan rasa untuk dicintai dan dimiliki. Kebutuhan ini mendorong individu untuk menjalin hubungan emosional dengan orang lain, yang diwujudkan dalam bentuk keinginan untuk memiliki dan dimiliki, mencintai dan dicintai. Kehidupan tanpa cinta dan kasih sayang dapat menjadi hambatan dalam proses tumbuh kembang anak. Selain itu, kebutuhan ini juga mencakup perasaan diakui dan diterima sebagai bagian dari suatu kelompok, merasa dirinya berharga, memiliki rasa solidaritas, serta kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain.

4. Kebutuhan untuk dihargai

Kebutuhan untuk dihargai terbagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu harga diri dan penghargaan dari orang lain. Harga diri merujuk pada perasaan berharga dan

keyakinan individu terhadap dirinya sendiri, yang tercermin melalui kepercayaan diri, prestasi, dan kemandirian. Selain penghargaan terhadap diri sendiri, anak juga perlu mendapatkan penghargaan dari orang lain, seperti penghargaan atas prestasi, kontribusi, atau kelebihan yang dimiliki seseorang. Kebutuhan ini sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis, terutama dalam membentuk rasa percaya diri. Ketika anak kehilangan kepercayaan diri, akan berdampak pada kondisi psikologinya seperti menyebabkan mereka menutup diri, merasa tidak berdaya, merasa malu, kehilangan semangat atau gairah hidup, dan pada akhirnya dapat menyebabkan rasa putus asa dan merasa tidak mampu melakukan apapun.

5. Kebutuhan aktualisasi diri

Kebutuhan aktualisasi menjadi puncak tertinggi pencapaian manusia setelah kebutuhan lainnya terpenuhi. Kebutuhan aktualisasi diri pada anak usia dasar masih bersifat ringan dan sederhana. Anak sangat gemar menampilkan kemampuan yang mereka miliki di depan orang lain. Anak sering kali melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendak mereka dan mengekspresikan diri secara bebas.

2.6.4 Tahap Perkembangan Anak

Perkembangan selalu ditandai adanya perubahan yang bersifat progresif, yang bertujuan agar manusia dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan dengan cara realisasi diri dan pencapaian kemampuan genetik. Perubahan yang dimaksudkan disini termasuk perubahan ukuran tubuh, bentuk tubuh dan kemampuan, serta hilangnya ciri-ciri lama untuk diganti dengan ciri-ciri baru.

Perkembangan pada anak terdiri dari aspek fisik, intelektual/kognitif, emosi, serta sosial. Keempat aspek tersebut sangat penting bagi perkembangan anak, karena aspek-aspek tersebut saling terkait satu dengan yang lain sehingga semua aspek perkembangan tersebut harus mendapat perhatian yang sama Jahja Yudrik (2015) dalam Mu'minatul Habibah (2020).

Perkembangan manusia berlangsung secara berurutan dan berkesinambungan dari periode ke periode. Adapun periode perkembangan anak menurut Eric Erikson dalam (Mokalu & Boangmanalu, 2021) adalah sebagai berikut :

1. *Trust versus Mistrust* (periode sejak lahir - 1 tahun)

Pada tahapan ini permulaan pembentukan kepribadian setiap individu. Rasa percaya tumbuh dari adanya perasaan akan kenyamanan fisik dan rendahnya rasa ketakutan serta kecemasan tentang masa depan. Rasa percaya pada masa bayi membentuk harapan sepanjang hidup bahwa dunia adalah tempat yang baik dan menyenangkan untuk hidup.

2. *Autonomy versus Shame and Doubt* (usia 1-3 tahun)

Tahapan ini adalah tahap kedua perkembangan individu yang ditandai oleh perkembangan kemandirian. Anak di usia ini akan memasuki tahap mengenal dunia eksternal, dimana anak akan mencoba mengenali dunia sekitarnya dengan pancaindera. Pada masa ini sampai batas-batas tertentu anak sudah mulai bisa berdiri sendiri, mencoba untuk duduk, berjalan, bermain, minum dari botol sendiri tanpa ditolong oleh orang tuanya. Anak-anak pada tahap ini sudah menampilkan rasa kemandiriannya. Kemandirian anak akan optimal

dan berkembang jika mendapat dukungan atau dorongan dari orang tuanya terhadap usaha yang dilakukan oleh anak.

3. *Initiative versus Guilt* (3-6 tahun)

Masa ini sering disebut dengan masa prasekolah (*preschool age*) yang ditandai dengan adanya kecenderungan *initiative-guilty*. Pada tahap ini, perkembangan anak ditandai dengan kemampuan prakarsa sesuai dengan tugas perkembangannya. Tahap ketiga ini juga dikatakan sebagai masa bermain. Tahap ini terjadi pada suatu periode tertentu saat anak menginjak usia 3 sampai 6 tahun, dan tugas yang harus diemban seorang anak pada masa ini ialah untuk belajar mempunyai gagasan (inisiatif) tanpa banyak terlalu melakukan kesalahan. Inisiatif yang dimaksud ialah respon positif pada tantangan-tantangan dalam kehidupan. Orang tua mengharapkan inisiatif yang ditimbulkan anak adalah mampu mengeluarkan idenya.

4. *Industry versus Inferiority* (usia 6-12 tahun)

Tahap ini terjadi pada anak saat memasuki sekolah dasar. Inisiatif anak membawanya berhubungan dengan berbagai pengalaman yang baru. Ketika anak memasuki masa anak pertengahan dan akhir, mereka mengarahkan kekuatannya untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan intelektual. Sebagai kelanjutan dari perkembangan tahap sebelumnya, pada masa ini anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya. Anak memiliki perasaan bahwa ia mampu melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuannya.

5. *Identity versus Confusion* (usia 12-18 tahun)

Periode ini anak sudah mulai memasuki usia remaja. Masa ini merupakan masa pencarian identitas. Pada masa ini individu diperhadapkan untuk menemukan eksistensi dirinya (biasa disebut dengan pencarian jati diri). Akan ada berbagai macam gangguan yang harus diatasi agar dapat mencapai identitasnya. Apabila seorang remaja dalam mencari jati dirinya bergaul dengan lingkungan yang baik maka akan tercipta identitas yang baik pula. Jika tidak, maka akan terjadi krisis identitas.

2.6.5 Tugas Perkembangan Anak

Tugas perkembangan anak merupakan sebagai *social expectation* yang artinya setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Adapun tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan menurut Erik Erickson (1963) dalam (Mokalu & Boangmanalu, 2021) adalah sebagai berikut :

1. Masa bayi (0-1,5 tahun), anak belajar bahwa dunia merupakan tempat yang baik baginya, dan ia belajar menjadi optimis mengenai kemungkinan-kemungkinan mencapai kepuasan.
2. Masa Toddler (1,5-3 tahun), anak belajar menggunakan kemampuan bergerak sendiri untuk melaksanakan dua tugas penting, yakni pemisahan diri dari ibu dan mulai menguasai diri, lingkungan serta keterampilan dasar untuk hidup.
3. Awal masa kanak-kanak (> 4 tahun), anak belajar mencontoh orang tuanya, pusat perhatian anak berubah dari benda ke orang.

4. Awal masa kanak-kanak (6-7 tahun), anak belajar menyesuaikan diri dengan teman sepermainannya, ia mulai bisa melakukan hal-hal kecil (berpakaian, makan) secara mandiri.
5. Akhir masa kanak-kanak (8-11 tahun), anak belajar untuk membuat kelompok dan berorganisasi.
6. Awal masa remaja (12 tahun), anak belajar membuang masa kanak-kanaknya dan belajar memusatkan perhatian pada diri sendiri.
7. Perkembangan remaja hingga dewasa awal (13-18 tahun), anak mulai memusatkan perhatian pada diri sendiri, mulai menentukan pemilihan tujuan hidup, belajar berdikari, belajar bijaksana.

Setelah memahami konsep anak serta kedudukannya dalam masyarakat, penting untuk melanjutkan kajian pada aspek partisipasi anak. Partisipasi merupakan salah satu hak dasar anak yang tidak hanya menjamin kebebasan untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga membuka ruang bagi anak untuk terlibat aktif dalam berbagai proses yang menyangkut kehidupan mereka. Pembahasan selanjutnya akan menguraikan makna partisipasi anak, bentuk-bentuknya, serta peran strategisnya dalam mendukung perlindungan anak berbasis masyarakat.

2.5 Kajian tentang Partisipasi Anak

2.7.1 Pengertian Partisipasi Anak

Roger Hart (1992) dalam (Wardhani et al., 2024) merumuskan model partisipasi anak dalam bentuk tangga partisipasi, yang menggambarkan perjalanan dari tahap manipulasi oleh orang dewasa hingga pada tahap di mana anak-anak

mampu menginisiasi suatu kegiatan dan melibatkan orang dewasa secara setara. Tangga partisipasi ini berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menjelaskan berbagai tingkat keterlibatan anak dalam proses pembangunan. Model tersebut terdiri dari delapan jenjang partisipasi, dimulai dari level paling rendah di mana anak-anak hanya menjadi simbol atau pelengkap, hingga level tertinggi, yaitu ketika mereka berperan aktif sebagai warga negara yang memiliki hak suara dan pengaruh dalam pengambilan keputusan.

Teori partisipasi anak yang dikembangkan oleh Roger Hart terbagi ke dalam 2 kategori. Kategori pertama adalah *non-participation* atau partisipasi semu, yang mencakup tiga jenjang awal. Jenjang pertama adalah manipulasi, yaitu situasi di mana anak menjalankan suatu kegiatan atas arahan orang dewasa tanpa memahami konteks atau tujuan dari kegiatan tersebut. Dalam fase ini, anak seolah-olah dilibatkan, namun sebenarnya keputusan telah ditentukan sebelumnya oleh orang dewasa tanpa transparansi. Jenjang kedua disebut *dekorasi*, ketika anak diminta hadir dalam kegiatan tertentu dan mengenakan simbol atau atribut, namun tidak memahami isu atau perannya secara substansial. Sementara itu, jenjang ketiga adalah tokenisme, yaitu ketika anak diminta pendapatnya, tetapi tidak diberi ruang atau keleluasaan untuk menentukan bagaimana pendapat tersebut disampaikan dan dipertimbangkan (Hart, 1992).

Kategori kedua disebut *degree of participation* yang mencerminkan bentuk partisipasi yang lebih bermakna. Jenjang keempat adalah diberi tugas dan diberi informasi (*assigned but informed*), yaitu anak berpartisipasi dalam kegiatan yang telah ditentukan oleh orang dewasa, tetapi mereka mengetahui peran dan

tujuannya secara jelas. Jenjang kelima adalah dikonsultasikan dan diberi informasi (*consulted and informed*), dimana anak diminta pendapatnya dan terlibat dalam diskusi yang transparan. Pada jenjang keenam, kegiatan diprakarsai oleh orang dewasa namun keputusan dibuat bersama anak-anak (*adult-initiated, shared decision with children*). Selanjutnya, jenjang ketujuh merupakan bentuk partisipasi yang dipelopori dan dipimpin oleh anak-anak sendiri (*child-initiated and directed*), sementara orang dewasa hanya mendukung tanpa mengambil alih kendali. Puncaknya adalah jenjang kedelapan, yaitu inisiatif anak dengan pengambilan keputusan bersama orang dewasa (*child-initiated, shared decisions with adults*), ketika anak menyusun gagasan dan perencanaan, kemudian berdiskusi dengan orang dewasa yang bersedia memberikan saran dan keahliannya tanpa mendominasi proses (Hart, 1992).

Melalui model ini, Hart menegaskan perbedaan antara partisipasi anak yang bersifat semu dan partisipasi yang autentik. Idealnya, anak memiliki hak untuk dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan langsung dengan hak dan kepentingan mereka. Namun, dalam praktiknya, pelibatan anak sering kali bersifat simbolik, dan pendapat mereka jarang dipertimbangkan secara serius. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: anak yang mana yang dilibatkan, dalam kategori apa, dan sejauh mana negara atau pemerintah mengakomodasi suara mereka dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.

2.7.2 Manfaat Partisipasi Anak

Partisipasi anak diakui sebagai salah satu prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak PBB, yang menjamin hak anak untuk terlibat secara aktif dan menyampaikan pendapat mereka secara bebas dalam setiap hal yang menyangkut kehidupan mereka. Pelibatan anak membawa berbagai manfaat penting. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan pemahaman anak tentang isu-isu sosial dan politik, serta kesadaran terhadap hak dan tanggung jawabnya. Partisipasi mendorong anak untuk berpikir kreatif dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat tanpa rasa takut. Hal ini juga berkontribusi pada penguatan rasa percaya diri, harga diri positif, serta membentuk budaya saling menghargai antara anak dan orang dewasa (Hart, 1992).

Partisipasi membantu anak mengembangkan kemampuan kepemimpinan, tanggung jawab sosial, dan hubungan yang sehat dengan teman sebaya maupun orang dewasa. Anak juga lebih siap untuk menjalankan tanggung jawab seperti orang dewasa dan memastikan hak-haknya dihormati dan dipenuhi. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat juga meningkat, seiring dengan berkembangnya keterampilan berpikir, rasa percaya diri, dan kedewasaan. Anak yang dilibatkan secara aktif juga cenderung lebih mampu memahami dan mengendalikan lingkungan di sekitarnya, serta mengakses hak-haknya yang lain secara lebih efektif (Hart, 1992).

Melalui partisipasi, anak merasa dihargai dan berani menyuarakan pandangan mereka, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk melaporkan kekerasan atau eksploitasi. Partisipasi menjadi sarana penting untuk melindungi

anak dari risiko yang dapat merugikan, serta mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik dalam hidup mereka. Selain mendukung perkembangan kognitif dan kemampuan berpikir kritis, partisipasi juga memperkuat semangat kewargaan dan membentuk kepercayaan diri yang kuat pada diri anak (Hart, 1992).

2.6 Kajian tentang Pengembangan Masyarakat

2.8.1 Pengertian Pengembangan Masyarakat

Menurut Cristenson dan Robinson dalam (Hasanah & Putri, 2019) menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat merupakan sebuah proses dimana masyarakat yang tinggal pada lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan sebuah tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk mengubah kondisi ekonomi, sosial, kultur dan lingkungan mereka. Senada dengan itu, (Suharto, 2021) menekankan bahwa pengembangan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan aktif serta inisiatif dari anggotanya sendiri. Dalam pendekatan ini, masyarakat tidak diperlakukan sebagai kelompok yang bermasalah, melainkan dipandang sebagai entitas yang khas dengan berbagai potensi yang belum sepenuhnya tergali dan dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengembangan masyarakat merupakan model intervensi komunitas yang dipandang sebagai proses yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan adanya partisipasi dan penguatan yang memiliki prinsip berkelanjutan agar terciptanya kesejahteraan.

2.8.2 Tahapan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Komunitas

Menurut Netting (2004) dalam (Ocktilia, 2020) praktik pekerjaan sosial dengan komunitas terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Inisiasi Sosial

Tahap awal yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dan penerimaan di masyarakat. Proses ini melibatkan kontak awal, pemahaman terhadap karakteristik komunitas, serta pembentukan relasi agar tercipta kesiapan dan kesepakatan untuk bekerja sama.

2. Pengorganisasian Sosial

Proses mengidentifikasi struktur sosial dan organisasi dalam komunitas, dengan melibatkan unsur-unsur yang dapat menggerakkan masyarakat secara terkoordinasi dalam kegiatan penyuluhan serta pemberdayaan sosial.

3. Asesmen Sosial

Tahap pengumpulan informasi untuk menilai potensi dan sumber daya yang tersedia dalam masyarakat. Proses ini mencakup pengumpulan data, identifikasi, analisis, dan penilaian terhadap kondisi sosial.

4. Perencanaan Intervensi

Penyusunan strategi untuk mengatasi permasalahan sosial yang telah diidentifikasi. Tahap ini mencakup perumusan dan pemilihan solusi terbaik guna mencapai tujuan intervensi.

5. Intervensi

Pelaksanaan rencana yang telah disusun bersama dengan masyarakat secara aktif menjalankan program intervensi untuk mencapai perubahan yang diharapkan.

6. Evaluasi

Proses penilaian terhadap keberhasilan intervensi, baik dari segi pelaksanaan maupun pencapaian hasil yang telah ditetapkan.

7. Terminasi dan Rujukan Sosial

Pengakhiran hubungan secara formal antara pekerja sosial dengan komunitas sasaran. Rujukan dilakukan sebagai tindak lanjut untuk memastikan keberlanjutan program atau layanan yang diperlukan oleh masyarakat.

2.8.3 Model Pengembangan Masyarakat

Menurut Rothman (1995) dalam (Suharto, 2021) model pengembangan masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model *locality development*. Model *locality development* adalah proses yang ditujukan untuk menciptakan kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat tidak hanya dipandang sebagai sistem klien yang bermasalah tetapi juga sebagai masyarakat unik yang memiliki potensi tetapi potensi tersebut belum sepenuhnya dikembangkan. Pekerja sosial membantu meningkatkan kesadaran dan mengembangkan kemampuan mereka dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Setiap anggota masyarakat bertanggung jawab untuk menentukan tujuan dan memilih strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut.

2.8.4 Strategi dan Taktik Pengembangan Masyarakat

Menurut Netting et al (2016) dalam (Suharto, 2021) strategi pengembangan masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu strategi kolaborasi. Strategi kolaborasi menunjukkan adanya hubungan antara kedua sistem yaitu sistem sasaran dengan sistem pelaksana perubahan yang mana kedua sistem itu saling menyetujui dilakukannya perubahan. Terdapat dua jenis kolaborasi, yang pertama adalah implementasi yang digunakan ketika sistem sasaran dan pelaksana bekerja sama dengan kesepakatan akan perubahan yang diinginkan dan adanya dukungan pengambil keputusan akan alokasi dana yang dibutuhkan, sedangkan jenis kolaborasi yang kedua adalah membangun kapasitas (*capacity building*) yang dilakukan melalui partisipasi dengan mengacu pada kegiatan-kegiatan yang berupaya untuk melibatkan anggota sistem klien dalam usaha perubahan.

2.8.5 Peran Pekerja Sosial dalam Praktik Pekerjaan Sosial dengan Komunitas

Menurut Spergel dan Zastrow (2017) dalam (Suharto, 2021) peran pekerja sosial dalam pengembangan masyarakat diantaranya adalah:

1. Pernercepat perubahan (*enabler*)

Pekerja sosial membantu masyarakat dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi serta membantu masyarakat agar memahami dan menentukan kebutuhan. Selain itu, pekerja sosial juga mengembangkan kapasitas masyarakat dapat menangani masalah yang dihadapi secara lebih efektif.

2. Perantara (*Broker*)

Pekerja sosial menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat ketika tidak mengetahui sumber tersebut. Kegiatan dilakukan dengan melibatkan penerima manfaat dalam perhubungan, dengan tujuan ketika dilakukannya terminasi penerima manfaat mampu untuk menjalin hubungan dengan sistem sumber terkait.

3. Pendidik (*educator*)

Pekerja sosial mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas serta mudah di mengerti dan dapat diterima oleh masyarakat. Hal tersebut, mengharuskan seorang pekerja sosial profesional mempunyai pengetahuan yang cukup memadai mengenai topik yang akan dibicarakan bersama masyarakat, agar informasi tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

4. Perencana sosial (*social planner*)

Tugas-tugas yang dilakukan oleh pekerja sosial sebagai seorang *social planner* diantaranya adalah mengumpulkan data tentang masalah sosial, menganalisis data, menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah tersebut, mengembangkan program, mencari alternatif sumber pendanaan, dan mengembangkan konsensus dalam kelompok yang mempunyai berbagai minat ataupun kepentingan.

5. Tenaga Ahli (*expert*)

Pekerja sosial memberikan masukan, saran dan dukungan informasi dalam berbagai area. Usulan dan saran merupakan masukan gagasan sebagai bahan

pertimbangan masyarakat ataupun organisasi dalam proses pengambilan keputusan, dalam artian tidak mengharuskan penerima atau masyarakat untuk melaksanakan.

6. Advokat (*advocate*)

Pekerja sosial melakukan advokasi atau pembelaan mewakili kelompok masyarakat atau organisasi yang membutuhkan bantuan atau layanan. Terkait dengan peran ini, seorang pekerja sosial melakukan persuasi terhadap kelompok profesional ataupun kelompok agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

7. Aktivis (*activist*)

Peran ini melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dan seringkali bermaksud pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang beruntung. Pekerja sosial memperhatikan isu-isu tertentu seperti ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku, kesenjangan dan perampasan hak.

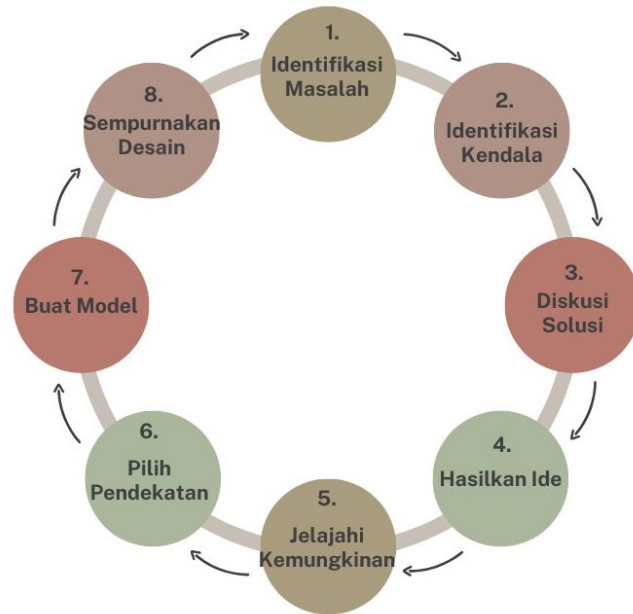
Setelah membahas aspek partisipasi anak dan peran kepemimpinan dalam pengorganisasian di tingkat masyarakat, kajian selanjutnya akan membahas tentang rekayasa teknologi. Dalam konteks ini, rekayasa teknologi tidak hanya merujuk pada aspek teknis atau digital, tetapi juga mencakup rekayasa teknologi pekerjaan sosial yang dirancang untuk menjawab masalah sosial secara sistematis. Rekayasa teknologi menjadi pendekatan penting dalam merancang intervensi yang efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk dalam membangun sistem perlindungan anak berbasis masyarakat.

2.7 Kajian tentang Rekayasa Teknologi Pekerjaan Sosial

Rekayasa teknologi (*engineering technology*) memainkan peran penting dalam penerapan praktis ilmu pengetahuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Rekayasa teknologi mencakup proses merancang, memodifikasi, mengembangkan, atau menciptakan inovasi baru yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Rekayasa teknologi mencakup dua komponen utama yaitu teknologi kerja, yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta teknologi lunak, yang mencakup penerapan model, desain, program, pendekatan, strategi, dan teknik dalam pekerjaan sosial (Pujileksono et al., 2021).

Rekayasa teknologi pekerjaan sosial adalah proses membuat desain, modifikasi, mengembangkan atau menciptakan teknologi baru guna meningkatkan proses atau fungsi yang ada. Dalam proses rekayasa, pekerja sosial bertanggung jawab atas penelitian, analisis, desain, dan pengembangan gagasan yang berpotensi bermanfaat bagi praktik pekerjaan sosial. Rekayasa teknologi pekerjaan sosial dapat diterapkan pada empat profil rekayasa, yaitu terapi psikososial, manajemen organisasi pelayanan kemanusiaan, pengembangan komunitas, dan analisis kebijakan sosial (Yuliani & Pujileksosno, 2021).

Proses desain rekayasa terdapat dua model yaitu model STEM (*Science Technology Engineering Mathematic*) dan model siklus. Proses model STEM meliputi: (1) Identifikasi masalah, (2) Diskusi pemecahan masalah, (3) Mendesain, (4) Membuat atau mewujudkan desain, (5) Berbagai solusi



Gambar 2. 2 Model Siklus Rekayasa Teknologi
Sumber : (Pujileksono et al., 2021)